

PENCITRAAN PARTAI DEMOKRAT DI HARIAN KOMPAS DAN JAWA POS DALAM PEMBERITAAN PEMERIKSAAN ANAS URBANINGRUM OLEH KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK)

Fransiska Aprilia, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya

Aprilia_catmew@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Partai Demokrat dicitrakan oleh Harian Kompas dan Jawa Pos dalam pemberitaan di media terkait pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK. Citra sebagai bagian penting dari sebuah organisasi bisa dilihat dari bagaimana media mengkonstruksikannya di dalam pemberitaan media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *framing* Robert Entman. Media sebagai sumber informasi menghasilkan pencitraan terhadap suatu organisasi yang kemudian disajikan kepada pembacanya dan membentuk pencitraan pembaca terhadap organisasi yang diberitakannya. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisis framing, peneliti ingin meneliti proses pembentukan suatu berita dan ideologi yang mempengaruhi pembentukan berita tersebut, dimana hal ini menimbulkan pencitraan tertentu yang ditampilkan oleh media massa dalam penyajian beritanya, yang berkaitan dengan ideologi media tersebut. Hasil dari penelitian ini dalam pemberitaan Kompas, Partai Demokrat terkait pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK dicitrakan sebagai partai yang tidak bersih, dan tertutup sedangkan pada Harian Jawa Pos Partai Demokrat dicitrakan memiliki solidaritas yang tinggi dan bersifat terbuka.

Kata Kunci: Pencitraan, Partai Demokrat, Harian Kompas, Harian Jawa Pos, *Framing*.

Pendahuluan

Dalam dunia politik Indonesia, Partai Demokrat telah berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2004 dan 2009 dan menjadi partai yang memiliki kedudukan terbanyak di pemerintah saat ini (Vivanews, 2011). Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono untuk tetap menjadi Presiden Indonesia hingga 2014 dan Budi Yuhono sebagai Wakil Presiden Indonesia mengangkat nama Partai Demokrat dan citra sebagai partai yang bersih dan mendukung rakyat. Citra sendiri dapat dikatakan sebagai persepsi masyarakat dari adanya pengalaman, kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan, sehingga aspek fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan layanan yang disampaikan karyawan kepada konsumen dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap citra (Wasesa, 2006, p. 13).

Partai Demokrat dipercaya sebagai partai yang mendukung kepentingan rakyat dan mendengarkan suara rakyat. Masyarakat dari lapisan paling bawah sampai dengan lapisan paling atas memiliki keyakinan akan hal ini. Partai Demokrat juga merupakan partai yang aktif dalam mencitrakan diri di media, sejauh ini Partai Demokrat menduduki posisi kedua setelah Partai Golkar dalam menggunakan media dengan penggunaan dana dalam jumlah yang cukup besar (*Tribun Kaltim*, 2010, para. 5). Tidak hanya berhenti pada saat pemilu, sebagai bentuk usaha untuk mempertahankan citra positif yang sudah dibentuk melalui kemenangan dalam Pemilu 2009, Partai Demokrat juga mengeluarkan iklan dan video yang bertujuan untuk menunjukkan kepedulian terhadap rakyat seperti video “Ucapan Imlek 2563 Partai Demokrat”. Kemudian melalui *website* yang dikelola dengan memberikan *pooling* yang menjadi sebuah cara interaktif dengan setiap orang yang mengakses *website* Partai Demokrat (*PartaiDemokrat.co.id*, 2012). Anas Urbaningrum sendiri selaku Ketua Umum Partai Demokrat memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat, karena dukungannya dan pandangannya mengenai pentingnya demokrasi. Pemilihan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum dianggap sebagai salah satu proses demokrasi yang dijalankan oleh Partai Demokrat. Kredibilitas ini mulai dipertanyakan saat kemudian Anas Urbaningrum diduga terkait dalam kasus korupsi proyek Hambalang, Bogor yang membawanya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berita tentang adanya kasus korupsi dan suap dalam proyek Hambalang, Bogor mulai dimuat media membawa beberapa nama seperti Muhammad Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, Andi Malaranggeng, dan juga Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat dikatakan terlibat dalam proyek Hambalang oleh Nazaruddin (*Kompas*, 2012, para. 8). Anas Urbaningrum membantah pernyataan tersebut dan sebelumnya pada 18 Juli 2011 ia telah memecat Muhammad Nazaruddin dari posisinya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2012 Anas Urbaningrum dipanggil oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan atas ada atau tidaknya keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi proyek Hambalang, pemeriksaan ini kemudian dilanjutkan pada tanggal 04 Juli 2012. Adapun penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games (*Kompas*, 2012, para. 4). Dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi dan suap dituding menjadi penyebab turunnya perolehan suara Demokrat hingga urutan ketiga setelah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Hal tersebut disampaikan Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Barkah Patimahu, dalam konferensi pers hasil temuan dan analisis survei nasional di kantornya, Jakarta, Minggu, 5 Februari 2012 (*Tribunews*, 2012, para. 6). Serangkaian pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum yang juga merupakan Ketua Umum partai Demokrat, menghasilkan opini sendiri dalam masyarakat. Pemberitaan mengenai dugaan korupsi Hambalang awalnya dimulai dari Nazaruddin yang kemudian menyebutkan nama Anas Urbaningrum pada saat diperiksa oleh KPK, beberapa saat pemberitaan mengenai kasus ini tidak terlihat di media hingga pada tanggal 27 Juni 2012, media memberitakan KPK mengumumkan akan menjadwalkan pemanggilan Anas Urbaningrum terkait

dugaan korupsi Hambalang. Pemberitaan tersebut langsung menuai berbagai respon dari masyarakat yang rata-rata bersifat negatif. Walaupun hasil pemeriksaan tersebut tidak menghasilkan bukti kuat, pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap kredibilitas Partai Demokrat dalam menjalankan janji sebagai Partai Anti Korupsi. Bahkan di dalam partai Demokrat sendiri, dimana Ruhut Sitompul Ketua DPP Partai Demokrat meminta Anas Urbaningrum untuk mundur dari jabatannya agar tidak semakin memperburuk citra Partai Demokrat.

Saat ini, media adalah sarana mendapatkan informasi terbaru dan tercepat dalam kehidupan manusia. Baik media cetak maupun elektronik, keduanya memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia. Kemunculan media cetak dalam kehidupan manusia, mempercepat aktivitas komunikasi dan informasi (Nurudin, 2007, p. 54). Media tidak hanya menjadi sarana informasi tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan hal-hal baru kepada masyarakat. Tidak dipungkiri, juga menjadi tempat suatu komunitas atau lembaga maupun perusahaan untuk mempromosikan produk, visi, ataupun untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Dalam pembentukan citra, ketika kekuatan politik ingin menghancurkan atau menurunkan citra politik lawan, hanya perlu membanjiri informasi di media massa dengan hal-hal buruk yang dilakukan lawan politik. Begitu juga sebaliknya apabila ingin membentuk citra yang positif cukup dengan membanjiri media massa dengan hal-hal positif dari suatu partai atau kandidat (Firmanzah, 2009, p. 29). Keefektifan media massa dalam menyampaikan pesan politik telah menjadikannya ajang baru pertempuran politik (Firmanzah, 2009, p. 28). Setiap kegiatan sebuah organisasi politik kemudian diatur dan selalu dihadiri oleh media, yang kemudian nantinya akan diberitakan media dan menambahkan nilai bagi citra suatu organisasi atau oknum politik.

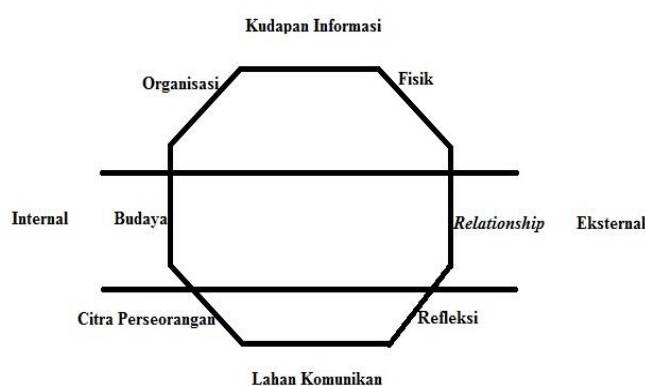
Melihat bagaimana pembentukan opini publik oleh media mempengaruhi citra, *public relations* sebagai pembentuk citra melihat pentingnya melakukan relasi dengan media terkait dengan bagaimana media mampu membentuk opini publik. Relasi media ini memiliki tugas salah satunya adalah memantau pemberitaan media terhadap perusahaan atau organisasinya. Selain memantau, juga mengukur citra yang dibentuk oleh media sehingga bisa diketahui bagaimana citra perusahaan atau organisasi yang dikonstruksi oleh media (Argenti, 2005, p. 166). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah salah satu cara melihat pencitraan di media, dimana peneliti melihat bagaimana media mencitrakan Partai Demokrat dalam pemberitaan mengenai Anas Urbaningrum. Media menjadi salah satu cara untuk melihat dan menemukan opini publik tetapi juga tidak dilupakan bahwa media juga memiliki kapasitas untuk melakukan *setting agenda*. Saat dimulai pemberitaan mengenai pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK, media sudah lebih dahulu mengkonstruksikan citra bahwa Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus tersebut dan bahkan pandangan negatif dari masyarakat mulai terbentuk. Peneliti menemukan fenomena menarik bagaimana media berperan dalam pencitraan di dalam setiap pemberitaannya terhadap oknum atau organisasi tertentu. Pemberitaan media bisa membentuk sebuah realita sosial berupa opini publik yang kemudian menciptakan citra organisasi. Seperti pemberitaan mengenai keterlibatan fraksi-fraksi Partai Demokrat yang kemudian berdampak

pada citra Partai Demokrat secara keseluruhan. Maka dari penjelasan di atas, peneliti ingin mencari tahu bagaimana Pencitraan Partai Demokrat di Harian Kompas dan Jawa Pos dalam pemberitaan pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK?

Tinjauan Pustaka

Citra dan Pencitraan

Citra adalah kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya (Jefkins, 1994, p. 123). Hal ini berarti citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Impresi inilah yang membentuk sebuah pengalaman pada publik yang akan mempengaruhi perilaku publik terkait dengan organisasi. Pencitraan sendiri diartikan oleh Jim McNamara dalam buku Strategi *Public Relations* (2010, p. 28) seperti berikut ini: Gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai seseorang, atau kelompok atau sebuah objek tertentu. Penggambaran tentang suatu tokoh atau objek dalam situasi dan kondisi tertentu. Persepsi banyak orang tentang ucapan, tindakan dan perilaku objek tertentu. Dengan demikian bisa didefinisikan bahwa pencitraan adalah penggambaran sebuah gambaran atau persepsi seseorang atau banyak orang terhadap suatu objek berkaitan dengan tampilan atau perilaku suatu objek dalam kondisi tertentu. Persepsi merupakan langkah awal dari pembentukan citra, persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan unsur lingkungan dimana kemampuan mempersepsi inilah dapat melanjutkan proses pembentukan citra dengan memberikan informasi-informasi kepada individu untuk memunculkan suatu keyakinan. Sehingga dari keyakinan tersebut timbul suatu sikap pro dan kontra tentang produk, dari sikap itulah terbentuknya citra yang positif atau negatif. Dalam melihat dan menelaah pencitraan (Wasesa & McNamara, 2010, p. 21) dirumuskan dalam buku Strategi *Public Relations* sebagai berikut:



Gambar 1. Dimensi Pencitraan

Internal adalah kategori yang berkaitan dengan pencitraan yang disebabkan oleh bagian internal organisasi. Adapun dimensi kategori internal terdiri atas:

1. Organisasi

Keseluruhan organisasi atau semua komponen organisasi dilihat

sebagai suatu kesatuan.

2. Budaya

Budaya atau kebiasaan seperti apa yang berkembang di dalam suatu organisasi.

3. Citra Perseorangan

Citra perseorangan yang dimaksud adalah citra masing-masing anggota atau individu dalam suatu organisasi.

Eksternal adalah kategori yang berkaitan dengan aktivitas eksternal organisasi dan memiliki kedekatan pengaruh terhadap model pencitraan. Kategori inilah yang selama ini diperankan oleh PR secara maksimal, seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Fisik

Penampilan fisik atau tampilan luar organisasi sering menjadi hal pertama yang dilihat publik dari sebuah organisasi, tampilan luar ini bisa berupa pengalaman publik dengan organisasi tersebut.

2. *Relationship*

Bagaimana organisasi menjalin hubungan atau kerjasama.

3. Refleksi

Refleksi yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan memberi reaksi atau tanggapan ataupun penilaian terhadap organisasinya.

Konstruksi Citra oleh Media Massa

Konstruksi citra pada umumnya adalah bagaimana agar citra yang dihasilkan selalu positif. Media Massa adalah agen yang menghasilkan konstruksi realitas sosial. Citra merupakan salah satu realitas sosial yang diciptakan oleh media dimana terdapat pengaturan kesan (*impression management*) yang berujung pada pencitraan. Pencitraan merupakan hasil pembingkai dan realitas ciptaan, oleh Gamson dan Modigliani (Eriyanto, 2006, p. 223-224) media massa bisa menciptakan bingkai yang menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa. *Agenda-setting* diperkenalkan oleh McCombs dan DL Shaw (1972). Jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat.

Media massa memiliki kemampuan untuk menciptakan konstruksi citra melalui pemilihan simbol, pemilihan fakta yang disajikan, dan kesediaan memberikan atau mengatur tempat untuk sebuah isu atau peristiwa (Hamad, 2004, p. 132). *Frame* atau bingkai yang disajikan oleh media massa tidak hanya sekedar menghadirkan realitas berita kepada pembacanya melainkan juga menyertakan sejumlah penilaian atau evaluasi atas fakta berita yang dikonstruksikan dalam suatu bentuk realitas tersendiri. Pencitraan oleh media massa berarti bagaimana media menciptakan citra tertentu mengenai suatu isu atau peristiwa melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media tersebut yang nantinya akan disajikan dan

diterima oleh masyarakat. Konstruksi realitas sendiri tidak dapat dihindarkan dari ideologi media massa dan wartawan.

Framing* bagi praktisi *public relations

Konsep *framing* yang menyediakan konteks dimana informasi diberikan dan diproses memberi alasan mengapa *framing* bisa digunakan dalam berbagai situasi dalam komunikasi. Kirk Hallahan (1999) menyimpulkan bahwa setidaknya ada tujuh macam *framing* yang bisa diaplikasikan dalam *public relations*.

Tabel 1. Tipologi *Framing* dalam PR

Apa yang dapat dianalisis oleh <i>framing</i>	Deskripsi
Situasi (<i>Situations</i>)	Relasi antar individu dalam keadaan situasi sehari-hari maupun literatur. <i>Framing</i> situasi menyediakan struktur untuk meneliti komunikasi.
Atribut (<i>Attributes</i>)	Karakteristik dari objek dan manusia selalu ditekankan, sehingga seringkali fakta lain tidak dipedulikan, hal ini menciptakan bias dalam proses komunikasi yang berfokus pada atribut.
Pilihan (<i>Choices</i>)	Arti dari keputusan alternatif baik negatif (kehilangan) maupun positif (mendapatkan) bisa memberi bias dalam memutuskan suatu situasi.
Tindakan (<i>Actions</i>)	Dalam konteks persuasi, kemungkinan akan tindakan seseorang untuk mencapai suatu tujuan dipengaruhi akan alternatif yang positif atau negatif.
Isu (<i>Issues</i>)	Masalah sosial bisa dijelaskan dalam arti lain oleh pihak lain yang menganggap bahwa masalah tersebut merupakan suatu kemenangan tersendiri.
Tanggung jawab (<i>Responsibility</i>)	Seseorang seringkali melihat sebab dari sebuah kejadian dari faktor internal atau external, tergantung dari tingkat stabilitas dan kontrol yang ada.
Berita (<i>news</i>)	Liputan media menggunakan tema yang bisa memunculkan informasi mengenai suatu kejadian.

Metode

Konseptualisasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak pada realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode analisa *framing*. Secara umum, *framing* melihat bagaimana media memaknai, memahami, dan membingkai kasus

atau peristiwa, metode seperti ini tentu saja berusaha mengerti, dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingkai isu (Eriyanto, 2009, p. 9). Pemikiran konstruksionis menjelaskan bahwa komunikasi mengambil ide dari interaksi simbolik. Sebagai salah satu bagian dari pesan, sebuah *frame* atau bingkai membatasi atau mendefinisikan makna dari pesan dengan cara membentuk pemikiran yang dibuat individu mengenai pesan tersebut. Bingkai-bingkai yang ada merefleksikan pemikiran dan penilaian yang dimiliki pembuat pesan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah surat kabar Kompas dan Jawa Pos dan Citra Partai Demokrat. Peneliti memilih harian Kompas karena merupakan koran nasional yang memiliki oplah cukup besar dan menganut ideologi nasionalis dalam pemberitaannya. Kompas merupakan harian nasional yang memiliki segmentasi pembaca menengah ke atas yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kondisi keuangan. Peneliti juga memilih harian Jawa Pos karena merupakan koran nasional kedua yang memiliki sirkulasi oplah nasional setelah harian Kompas dan memiliki ideologi menjalankan fungsi pers yang tidak memihak pada kelompok tertentu, sementara Dahlan Iskan sebagai pemimpin Jawa Pos saat ini menduduki jabatan Menteri BUMN. Peneliti ingin melihat apakah ideologi dan hal-hal di atas mempengaruhi proses penelitian berita pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK yang secara langsung bisa berdampak pada pencitraan Partai Demokrat. Penelitian ini mengambil Kompas dan Jawa Pos dengan edisi 28 Juni 2012 dan 05 Juli 2012 yang memuat artikel pemberitaan pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang memiliki fokus kompleks dan luas bersifat subyektif dan menyeluruh. Penekanan dalam penelitian kualitatif ialah kredibilitas data dimana kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti. Analisis data akan menggunakan metode *framing* dengan model milik Robert Entman. Metode ini didasari dengan melihat *framing* dari dua dimensi besar, yaitu: Seleksi isu, berhubungan dengan pemilihan fakta dimana wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Penonjolan aspek tertentu dari isu, berhubungan dengan penulisan fakta. Seleksi isu dan penonjolan isu ini yang menjadi bagian dalam membentuk persepsi publik yang menggunakan media sebagai sumber informasi. Konsep *framing* Robert Entman kemudian melihat pada pendefinisian masalah (*problem identification*), memperkirakan masalah atau sumber masalah (*causal interpretation*), membuat keputusan moral (*moral evaluation*), menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*).

Temuan Data & Analisis Data

Pencitraan Partai Demokrat oleh Kompas dan Jawa Pos dalam *Problem Identification*

Pada Harian Kompas, masalah yang diangkat oleh Kompas adalah masalah klarifikasi informasi terhadap Anas. Dalam identifikasi masalah yang dihadirkan Kompas dalam pemberitaannya, Partai Demokrat dicitrakan melalui pemeriksaan Anas Urbaningrum dan juga nama-nama anggota lainnya. Kompas memang mengidentifikasikan masalah pemeriksaan Anas Urbaningrum mengenai klarifikasi yang dilakukan oleh KPK, tetapi melalui liputan yang menyebutkan nama Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, mengarah pada adanya korupsi yang dilakukan oleh anggota Partai Demokrat. Kompas mencitrakan Partai Demokrat sebagai Partai yang terlibat korupsi dalam bagaimana Kompas menyajikan beritanya yang sebagian besar masuk pada pemahaman dimana Anas Urbaningrum dianggap sebagai sosok yang pemberitaannya memiliki nilai berita yang juga menyangkut Partai Demokrat.

Sementara pada Jawa Pos, peneliti menemukan pendefinisian masalah yang diangkat oleh Harian Jawa Pos adalah pemeriksaan Anas Urbaningrum merupakan masalah penting bagi Partai Demokrat. Jawa Pos lebih banyak menuliskan mengenai reaksi, tanggapan, dan sikap yang diambil Partai Demokrat terkait pemeriksaan Anas Urbaningrum. Pemberitaan di Jawa Pos memilih isu Partai Demokrat menanggapi pemeriksaan Anas oleh KPK. Harian Jawa Pos mencitrakan Partai Demokrat tidak melalui pemeriksaan Anas oleh KPK, tetapi melalui perkataan dan sikap dari anggota-anggota Partai Demokrat. Harian Jawa Pos mencitrakan Partai Demokrat sebagai partai yang menanggapi pemeriksaan Anas sebagai permasalahan partai, bukan permasalahan Anas Urbaningrum sebagai individu.

Pencitraan Partai Demokrat oleh Kompas dan Jawa Pos dalam *Causal Interpretation*

Harian Kompas dalam menentukan aktor atau penyebab masalah, membingkai Nazaruddin dan Ignatius Mulyono sebagai aktor yang menyebabkan adanya pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK. Harian Kompas melihat pada individu-individu sebagai penyebab masalah, dimana kedua aktor tersebut disebutkan oleh Kompas adalah anggota dari Partai Demokrat, Nazaruddin sebagai mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan Ignatius Mulyono sebagai anggota fraksi Partai Demokrat. Kompas menyebutkan nama Nazaruddin sebagai yang mengeluarkan pernyataan dan Ignatius Mulyono sebagai individu yang menyebutkan nama Anas Urbaningrum terlibat bersama mereka. Penyebab masalah yang diangkat oleh Kompas menunjukkan individu yang kemudian disebutkan Kompas secara jelas sebagai bagian dari Partai Demokrat.

Lain halnya dengan Jawa Pos, Jawa Pos memang menyebutkan nama Nazaruddin dan Mulyono, tetapi penekanan pada penyebab masalah pemeriksaan Anas Urbaningrum ini lebih ditekankan pada isu “dikabarkan” yang berarti menunjuk pernyataan sebagai penyebab terjadinya pemeriksaan Anas Urbaningrum. Media massa memiliki kemampuan untuk menciptakan konstruksi citra melalui pemilihan simbol, pemilihan fakta yang disajikan, dan kesediaan memberikan atau mengatur tempat untuk sebuah isu atau peristiwa (Hamad, 2004, p. 132).

Dalam pemberitaannya terlihat bahwa Jawa Pos memberitakan tanggapan Partai Demokrat setelah adanya pemeriksaan Anas oleh KPK. Jawa Pos membingkai peristiwa pemeriksaan Anas oleh KPK sebagai pemicu dari tanggapan-tanggapan dan aksi yang dituliskan oleh Jawa Pos dalam beritanya.

Pencitraan Partai Demokrat oleh Kompas dan Jawa Pos dalam *Moral Evaluation*

Pada *moral evaluation*, peneliti menemukan bahwa yang dicitrakan oleh media adalah budaya dari anggota dan organisasi Partai Demokrat. Budaya atau kebiasaan seperti apa yang berkembang di dalam suatu organisasi. Moral yang disajikan oleh Kompas mengenai Anas memperlihatkan bahwa Anas tidak memberikan informasi secara terbuka, hal ini menunjukkan adanya perbedaan dari apa yang dikatakan sumber mengenai “Partai Demokrat terbuka dalam memberikan informasi kepada media dan masyarakat”. Pemberitaan mengenai Anas Urbaningrum yang diperiksa oleh KPK yang dikonstruksikan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang diperiksa oleh KPK. Dalam sisi moral yang diangkat oleh Kompas menghadirkan bahwa Partai Demokrat mendukung Anas dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Jawa Pos menampilkan sisi moral dalam pemberitaannya dengan mengangkat Partai Demokrat memberi dukungan moral terhadap Anas Urbaningrum dengan menuliskan pendapat Saan Mustifa yang menyatakan “teman-teman semua secara spontan menemani Mas Anas”. Dalam pemberitaannya, Jawa Pos mencitrakan Partai Demokrat tidak menunjukkan tindakan atau pernyataan yang memojokkan Anas Urbaningrum. Dengan demikian secara keseluruhan Jawa Pos mencitrakan Partai Demokrat secara moral mendukung Anas Urbaningrum dengan adanya simpatisan dan pengawalan dari anggota Partai Demokrat dan tidak ikut campur dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK.

Pencitraan Partai Demokrat oleh Kompas dan Jawa Pos dalam *Treatment Recommendations*

Untuk rekomendasi dan saran yang diberikan oleh Harian Kompas, yang diangkat adalah penyelesaian dimana KPK akan menaikkan kasus tersebut dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, dimana akan segera ditentukan tersangka-terangkanya. Kompas menonjolkan aspek penyelesaian yang dilontarkan oleh pihak KPK dengan menyatakan akan ditentukannya tersangka dalam kasus Hambalang dikutip dari pernyataan Ketua KPK. Hal ini menunjukkan bahwa Kompas mengambil penyelesaian yang diajukan oleh KPK, tidak hanya itu Kompas juga mengambil harapan penyelesaian yang dikatakan oleh Partai Demokrat. Kompas menyajikan penyelesaian yang diharapkan Demokrat, Partai Demokrat mengharapkan melalui pemeriksaan tersebut Partai Demokrat bisa lepas dari kasus dugaan korupsi tersebut.

Sedangkan pada Jawa Pos, rekomendasi dan saran yang diangkat adalah pernyataan dari salah seorang anggota Partai Demokrat, Ruhut Sitompul yang

mengatakan bahwa sebaiknya Anas Urbaningrum mundur sementara dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Melalui pemberitaannya peneliti menemukan bahwa Jawa Pos mencitrakan Partai Demokrat sebagai Partai yang mengutamakan jalur hukum dimana hal ini sesuai dengan pernyataan dari sumber Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Partai Demokrat mengikuti aturan-aturan dan birokrasi hukum yang ditetapkan pemerintah.

Analisis Data

Peneliti menemukan Kompas mencitrakan Partai Demokrat terlibat korupsi terlihat dari citra anggota-anggotanya yang terkena kasus korupsi dan hubungan internalnya tidak baik dikarenakan adanya saling tuduh di dalam internal Partai Demokrat. Partai Demokrat mendukung Anas Urbaningrum tetapi ingin segera melepaskan diri dari kasus dugaan korupsi Hambalang yang berarti masalah tersebut menjadi masalah pribadi Anas Urbaningrum, secara keseluruhan peneliti menemukan pencitraan Partai Demokrat di Harian Kompas dalam pemberitaan pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK partai yang korupsi dan tertutup. Kompas sendiri memiliki ideologi tidak berpihak pada kelompok manapun atau bersifat netral, peliputan peristiwa yang dilakukan memang tidak memperlihatkan adanya keterpihakan Kompas kepada KPK maupun Partai Demokrat, tetapi adanya kesan memojokkan Partai Demokrat lewat penggunaan fakta yang disajikan menghasilkan pencitraan yang kurang baik bagi Partai Demokrat. Karena pada dasarnya media menghadirkan kembali realitas dengan cara pandang atau ideologinya sendiri.

Secara keseluruhan, peneliti menemukan Pencitraan Partai Demokrat di Harian Jawa Pos dalam pemberitaan pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK adalah Partai Demokrat memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan taat pada hukum. Harian Jawa Pos sendiri memiliki ideologi tidak berpihak pada kepentingan apapun, tetapi bisa dilihat bahwa pergerakan Jawa Pos Group di bidang ekonomi dan sekarang adanya Dahlan Iskan dalam pemerintahan bisa menjadi penyebab keberpihakan media, dilihat dari bagaimana Jawa Pos sebenarnya lebih banyak meliput tentang Partai Demokrat dibandingkan dengan kasus pemeriksaan Anas oleh KPK.

Interpretasi Data

Media Sebagai *Public Relations* Organisasi

Pemberitaan media merupakan hal yang paling penting bagi partai politik, karena apa yang dikatakan oleh media akan mempengaruhi persepsi publik terhadap partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, secara tidak langsung media menjadi PR bagi politik karena memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi persepsi publik. Persepsi ini yang nantinya menentukan bagaimana sikap publik terhadap partai politik apakah mendukung atau tidak. Hal ini kemudian akan mempengaruhi keputusan pembaca dalam mendukung atau mencela Partai Demokrat, terutama apakah akan memilih Partai Demokrat atau tidak pada saat pemilu 2014. Sementara Kompas bisa menghasilkan persepsi di atas pada

pembacanya, sebaliknya dengan Jawa Pos yang mencitrakan Partai Demokrat sebagai partai yang saling mendukung satu sama lain dan mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan individu. Nantinya bisa menciptakan sikap mendukung Partai Demokrat dan memilih Partai Demokrat pada pemilu 2014. Informasi dari media menjadi tolak ukur masyarakat dalam melihat partai politik yang akan didukungnya.

Ideologi Media Massa Menjadi Alat Pencitraan Organisasi Politik

Memang sebenarnya pemberitaan media tidak bisa dihindari dari adanya ideologi media yang mempengaruhi sudut pandang dalam menuliskan sebuah peristiwa menjadi berita. Tetapi tidak berarti ideologi yang dimasukkan ke dalam cara pemberitaan media massa selalu merugikan organisasi yang bersangkutan. Selain itu ideologi pribadi wartawan pun belum tentu merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaannya. Partai Demokrat dicitrakan cukup baik oleh Jawa Pos. Dengan kata lain, disini ideologi Kompas memberi kerugian pada citra Partai Demokrat ideologi sementara Jawa Pos memberi keuntungan bagi Partai Demokrat. Ideologi keduanya merupakan alat pencitraan tetapi memang tidak menjadi pencitraan yang positif bagi semua organisasi.

Dari analisa penelitian yang telah dilakukan peneliti juga menginterpretasikan bahwa Pencitraan Harian Kompas yang menganut jurnalisme keping dimana jenis jurnalisme ini mencari tahu sampai sejauh mana pers bisa dihadapkan dengan kekuatan pemerintahan, dan Jawa Pos yang menganut jurnalisme lingkungan sebagai berikut:

Tabel 2. Bingkai Pencitraan Partai Demokrat

Pencitraan Partai Demokrat

Harian KOMPAS 27 Juni – 28 Juni 2012 dan 4 Juli – 5 Juli 2012	Harian JAWA POS 27 Juni – 28 Juni 2012 dan 5 Juli 2012
Dari Narasumber , melakukan <i>cover both-sides</i> dimana Kompas melakukan wawancara dengan pihak KPK dan Partai Demokrat.	Narasumber yang diwawancarai Jawa Pos lebih banyak mengambil dari Partai Demokrat, sedangkan dari KPK tidak ditemukan wawancara yang lebih banyak.
Penekanan isu dan pemberitaan berpusat pada Anas Urbaningrum dan kasus dugaan korupsi Hambalang Kompas menghasilkan pencitraan Partai Demokrat sebagai partai yang tidak bersih (korup dan terkesan tertutup) .	Penekanan isu dan pemberitaan berpusat pada Anas dan Partai Demokrat Jawa Pos menghasilkan pencitraan Partai Demokrat sebagai partai yang secara internal memiliki sifat solidaritas yang tinggi

Simpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode *framing* milik Robert Entman, Harian Kompas dan Jawa Pos mencitrakan Partai Demokrat dalam pemberitaan pemeriksaan Anas Urbaningrum secara berbeda. Kompas menghasilkan pencitraan Partai Demokrat bersifat tertutup terhadap media dan publik. Partai Demokrat mendukung Anas Urbaningrum tetapi ingin segera

melepaskan diri dari kasus dugaan korupsi Hambalang yang berarti masalah tersebut menjadi masalah pribadi Anas Urbaningrum. Jawa Pos mencitrakan Partai Demokrat sebagai partai yang menganggap masalah pemeriksaan Anas oleh KPK sebagai masalah penting dan merupakan korban dalam peristiwa pemeriksaan Anas Urbaningrum oleh KPK. Jurnalisme lingkungan yang digunakan oleh harian Jawa Pos menghasilkan pencitraan Partai Demokrat sebagai partai bersolidaritas dan bersifat terbuka.

Peneliti juga menemukan bahwa pemberitaan media yang merupakan hal paling penting bagi partai politik, karena apa yang dikatakan oleh media akan mempengaruhi persepsi publik terhadap partai politik. Dapat menjadikan media secara tidak langsung media menjadi alat atau *tools* PR bagi organisasi karena memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi persepsi publik. Ideologi media massa bisa menjadi alat pencitraan organisasi terutama organisasi politik. Diluar dari apakah ideologi itu akan merugikan atau menguntungkan dalam pencitraan sebuah organisasi, tetapi ideologi media yang secara tidak langsung menjadi acuan dalam pembuatan berita, merupakan salah satu alat pencitraan bagi organisasi.

Daftar Referensi

- Alie, Marzuki.(2013). *Pemasaran Politik di Era Multipartai*. Jakarta: PT Mizan
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Firmanzah. (2007). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hallahan, Kirk. (1999). *Seven Models of Framing: Implication for Public Relations*. USA: Colorado State University.
- Jefkins, Frank. (2004). *Public Relations 5th ed*. Jakarta: Erlangga.
- Wasesa, Silih A, & MacNamara, .Jim. (2010). *Strategi Public Relations*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.